BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, maka Laporan Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Laporan Kinerja Tahunan sebagai bagian dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk/media pertanggungjawaban dalam pelaksanaan uraian tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025. Untuk itu sebagai perwujudan kewajiban tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang Tahun 2021-2026. Adapun Laporan ini memuat berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja secara menyeluruh dan terpadu.

Besar harapan kami semoga Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dalam peningkatan kinerja

terutama di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Kami sampaikan permohonan maaf atas kekurangan isi laporan ini. Oleh karena itu, diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan di masa mendatang.

Trenggalek, 31 Desember 2025
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19670331 199603 2 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 di dalamnya menyajikan tentang pencapaian sasaran strategis, realisasi pencapaian target kinerja dan pembandingan capaian kinerja program kegiatan sampai tahun terakhir dari Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026.

Capaian kinerja dan anggaran Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, dengan rata-rata realisasi kinerja sebesar 100,19% dan realisasi anggaran pendukung sebesar 97,74%;
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, dengan realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 98,26%;
3. Meningkatnya diseminasi/publikasi kelitbangan/ inovasi dalam pembangunan daerah, dengan realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,40%.

Sehingga capaian realisasi kinerja dan anggaran Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek tahun 2025 menurut rata-rata pencapaiannya dapat dikatakan berhasil, yakni capaian realisasi kinerja sebesar 100,06% dan capaian realisasi anggaran sebesar 98,08%.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraaan pengarustamaan gender dilakukan terhadap dua aktivitas pada dua sub kegiatan. Yaitu pelaksanaan Musrenbang RKPD dengan kehadiran perempuan 83 orang dan laki-laki 222 orang dengan capaian kinerja dan realisasi keuangan sebesar 100%. Aktifitas yang kedua adalah kegiatan Musrena Keren dengan kehadiran perempuan sebesar 59 orang dan laki-laki 108 orang dengan capaian kinerja dan realisasi keuangan sebesar 100%.

Untuk hasil capaian yang lebih baik di tahun-tahun mendatang, perlu adanya upaya-upaya perbaikan antara lain :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
   Melaksanakan upaya-upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, diantaranya melalui kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum 2
1.2.1 Sumber Daya Manusia 2
1.2.2 Sarana dan Prasarana 3
1.2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 4
1.3 Isu – Isu Strategis 15
1.4 Landasan Hukum 16
1.5 Sistematika Penulisan 18
BAB II PERENCANAAN KINERJA 19
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026 19
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 25
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 26
2.4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 30
3.1 Pengukuran Kinerja 2025 30
3.2 Analisis Capaian Kinerja 32
3.2.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek 33
3.2.2 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Trenggalek 36
3.2.3 Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya diseminasi/publikasi kelitbangan/ inovasi dalam pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek 37
3.3 Capaian Kinerja Lainnya 47
3.3.1 Capaian kinerja indikator tujuan..... 47
3.3.2 Capaian kinerja terkait pelaksanaan Pengarusutamaan Gender..... 49
3.4 Realisasi Anggaran 50
BAB IV PENUTUP..... 54
LAMPIRAN 56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil 3
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai PNS dan PPPK pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 ... 3
Tabel 1.3 Barang yang Dikelola Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4
Tabel 1.4 Tabel permasalahan dan isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek 16
Tabel 2.1 Matriks Perencanaan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 19
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek 25
Tabel 2.3 Perbandingan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 26
Tabel 2.4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 27
Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek 30
Tabel 3.2 Capaian Kinerja 32
Tabel 3.3 Perbandingan Target Realisasi Indikator 1 Sasaran 1 Tahun 2025 34
Tabel 3.4 Perbandingan Target Realisasi Indikator 2 Sasaran 2 Tahun 2025 35
Tabel 3.5 Perbandingan Target Realisasi Indikator 1 Sasaran 2 Tahun 2025 36
Tabel 3.6 Perbandingan Target Realisasi Indikator 1 Sasaran 3 Tahun 2025 38
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian dengan Kabupaten/Kota Lain 41
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan 41
Tabel 3.9 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025 48
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Tahun 2025 51
Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran 52
Tabel 3.12 Penghitungan Efisiensi 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 15
Gambar 3.1 Grafik Target dan Realisasi Nilai (Kategori Nilai) Sakip 2021-202533
Gambar 3.2 Grafik Target dan Realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 2021-2025..... 36
Gambar 3.3 Grafik Target dan Realisasi Persentase hasil kelitbangan/inovasi yang dipublikasi/didiseminasi Tahun 2021-2025 38

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematika dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi : rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja.

Pelaksanaan SAKIP pada Perangkat Daerah (PD) dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja PD sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. Entitas Akuntabilitas Kinerja PD adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja. Sehingga PD berkewajiban untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kinerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan yang terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.

Laporan Kinerja Tahunan merupakan ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Trenggalek selaku PD dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek sekaligus sebagai pengguna anggaran yang melaksanakan proses pencatatan,

pengolahan dan pelaporan data kinerja di bidang perencanaan, mempunyai kewajiban salah satunya adalah menyusun Laporan Kinerja Tahunan yang disampaikan kepada Bupati Trenggalek paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 di dalamnya menyajikan tentang pencapaian tujuan sasaran tahun 2025, realisasi pencapaian target kinerja tahun 2025 dan pembandingan capaian kinerja program kegiatan sampai tahun terakhir dari Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 disusun bertujuan untuk :

1. Sebagai media akuntabilitas atas amanah yang menjadi tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diemban Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan kinerjanya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
2. Sebagai sarana evaluasi sehingga dapat dijadikan bahan bagi pengambilan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.

1.2 Gambaran Umum

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek didukung dengan sumber daya manusia (SDM) sejumlah 63 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 38 orang dan PPPK sebanyak 25 orang sebagai berikut :

Karyawan / karyawati Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek tahun 2025 berjumlah 38 orang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil

No.	Golongan / Pendidikan / Eselon / Diklat	Jumlah	Satuan
	Menurut Golongan		
1	Golongan I	-	Orang
2	Golongan II	6	Orang
3	Golongan III	27	Orang
4	Golongan IV	5	Orang
	Jumlah Total	38	Orang
	Menurut Pendidikan		
1	Pasca Sarjana	12	Orang
2	Sarjana	19	Orang
3	Diploma (D-III)	2	Orang
4	Diploma (D-IV)	2	Orang
5	SLTA/SMA/SMK	2	Orang
6	SLTP/SMP	-	Orang
7	SD	1	Orang
	Jumlah Total	38	Orang
	Menurut Jenis Kelamin		
1	Laki - Laki	25	Orang
2	Perempuan	13	Orang
	Jumlah Total	38	Orang

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, Desember 2025

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai PNS dan PPPK pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025

No.	Jenis Pegawai	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	25	13	38
2	PPPK	15	10	25

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, Desember Tahun 2025

1.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Trenggalek sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.3 Barang yang Dikelola Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
1	Tanah	1
2	Alat-alat angkutan	48
3	Alat-alat bengkel dan alat ukur	4
4	Alat-alat pertanian/peternakan	1
5	Alat-alat kantor dan rumah tangga	618
6	Alat-alat studio dan komunikasi	98
7	Alat-alat kedokteran	5
8	Alat-alat laboratorium	4
9	Komputer	167
10	Alat-alat keamanan	1
11	Bangunan gedung	7
12	Instalasi	1
13	Jaringan	4
14	Buku/perpustakaan	289
15	Barang bercorak kesenian/kebudayaan	1
16	Aset tidak berwujud	11
	Jumlah Total	1.260

Sumber : Pengelola Barang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025

1.2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

B. Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
b. penyusunan perencanaan program dan anggaran fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
c. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan;
g. pembinaan UPTB;
h. pelaksanaan administrasi fungsi bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
i. penyusunan perjanjian kinerja;

j. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
k. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
m. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk, Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek terdiri atas :

a. Kepala Badan
b. Sekretariat terdiri atas sub bagian umum dan kepegawaian;
c. Bidang infrastruktur dan kewilayahan;
d. Bidang perekonomian dan sumber daya alam;
e. Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
f. Bidang penelitian, pengembangan, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terdiri atas Sub bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
g. Kelompok jabatan fungsional; dan
h. UPTB.

Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1. **Kepala Badan,** mempunyai tugas :
   a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Badan;

b. melaksanakan program dan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
d. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
e. menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan daerah;
f. melaksanakan penelitian dan pengembangan di daerah;
g. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
h. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas badan;
j. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
k. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi badan; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. **Sekretariat,** mempunyai tugas :
   a. merencanakan kebijakan operasional pada sekretariat berdasarkan kebijakan umum kepala badan dan rencana strategis dinas sebagai pedoman kerja;

b. mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan daerah, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja badan;
c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program penunjang urusan pemerintahan daerah, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan urusan penunjang, pemeliharaan barang milik daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan kepala badan dan kegiatan badan, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
e. menyelenggarakan fasilitasi perumusan dokumen perencanaan pembangunan;
f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretariat; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan sub bagian umum dan

kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

d. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
e. menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan kepala badan dan kegiatan badan serta mendokumentasikan berita;
f. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian badan;
g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan evaluasi jabatan lingkup badan;
h. menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian badan;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**, mempunyai tugas:
   a. menyusun program kerja dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
   b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;

c. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
d. melaksanakan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
e. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk prioritas provinsi dan nasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;
f. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pendukung dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. **Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**, mempunyai tugas :
   a. menyusun program kerja dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
   b. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;

c. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
d. melaksanakan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
e. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk prioritas provinsi dan nasional bidang perekonomian dan sumber daya alam;
f. melaksanakan penyusunan dokumen pendukung dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. **Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,** mempunyai tugas :
   a. menyusun program kerja dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
   b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah) di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

c. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
d. melaksanakan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
e. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk prioritas provinsi dan nasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
f. melaksanakan penyusunan dokumen pendukung dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. **Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan,** mempunyai tugas :
   a. menyusun program kerja dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang penelitian, pengembangan, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
   b. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan data kelitbangan, peraturan dan pengkajian peraturan,

penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan, penyusunan strategi dan penerapannya serta melaksanakan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;

c. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
d. menyusun rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
e. mengoordinasikan pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
f. mengoordinasikan pengintegrasian, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perencanaan dan pendanaan program-program pembangunan di daerah;
g. mengoordinasikan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pendanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
h. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian pengembangan, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.1. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Daerah, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan program/kegiatan pada sub

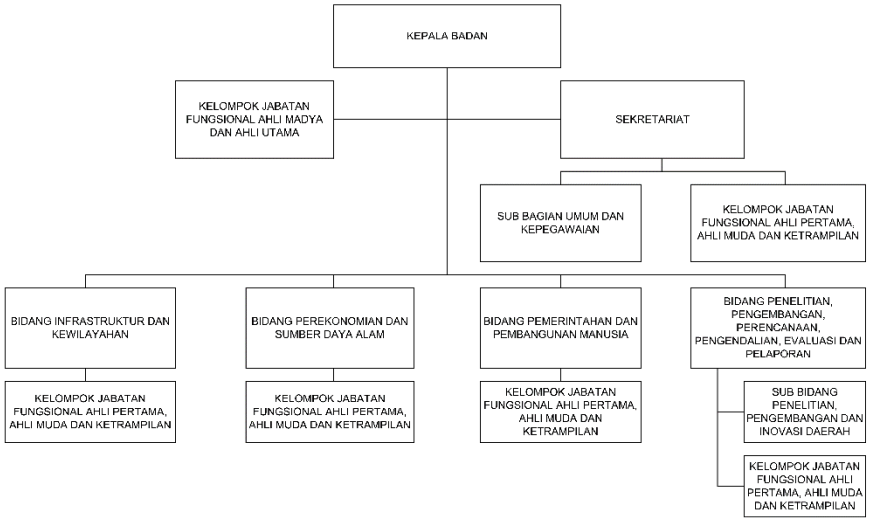
bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang penyelenggaraan pemerintahan serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
e. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual;
f. melakukan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada sub bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. UPTB.

Adapun Struktur Organisasi Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

1.3 Isu – Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi, Misi dan Program Strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, Renstra Bappedalitbang

Tahun 2021-2026 serta kondisi terkini, maka dirumuskan isu strategis pada Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek yaitu :

1. Peningkatan SDM perencana yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tupoksinya;
2. Pemantapan peran Bappedalitbang selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah;
3. Optimalisasi pengelolaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
4. Optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi untuk mendukung proses evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 1.4 Tabel permasalahan dan isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek

Permasalahan		Isu Strategis	
1.	Belum optimalnya integrasi dan sinkronisasi antara sistem perencanaan dan sistem pengendalian	1.	Pemantapan peran Bappedalitbang selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah
2.	Belum optimalnya penyediaan dan validasi data dalam SIPD database; Keterisian data dalam SIPD masih 80%; belum optimalnya kewenangan OPD pengampu dalam menangani aplikasi Perencanaan	2.	Optimalisasi dan validasi data perencanaan dan pembangunan daerah
3.	Keterbatasan SDM perencana baik dari segi jumlah, kompetensi dan kualitas	3.	Peningkatan SDM perencana yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tupoksinya
4.	Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), penelitian dan pengembangan	4.	Optimalisasi pengelolaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah

1.4 Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan sistematika penulisan, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang dan landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja, gambaran umum perangkat daerah, dan isu-isu strategis yang diampu perangkat daerah.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja serta Anggaran Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2025 dan data dukung lainnya sesuai kebutuhan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan perjanjian kinerja serta diselaraskan dengan dokumen Renstra 2021-2026 dan Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 5 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 Sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen tersebut Visi Kabupaten Trenggalek adalah :

> "Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang Maju melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif dan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)"

Terhadap Misi Kabupaten Trenggalek, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mendukung pada misi misi ke-3, yaitu :

> Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)

Untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Trenggalek diatas maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah menetapkan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana berikut :

Tabel 2.1 Matriks Perencanaan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
Tujuan : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Efektif, Efisien, Produktif dan Profesional	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	90,29
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) Sakip	94,30 (AA)

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	97,52
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	95%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	104 dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	89 laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	63 orang/bulan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	34 dokumen
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang diselesaikan	100%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	7 orang

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang diselesaikan	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	4 paket
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang diselesaikan	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	18 unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60 laporan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13 laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	52 unit
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	1 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	39 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Indeks Perencanaan	100%
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%	100%
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	3 dokumen
	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	82 dokumen
	Jumlah dokumen pengelolaan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun sesuai aturan	13 dokumen
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen RKPD yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati	4 dokumen
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	2 berita acara
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah berita acara forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	2 berita acara
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara musrenbang kabupaten/kota	2 berita acara
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan yang terverifikasi oleh kecamatan	2154 usulan
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 dokumen
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun	8 dokumen

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	12 laporan
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun	7 dokumen
	Persentase rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah pada masing-masing bidang di atas 80%	100%
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun	3 dokumen
	Persentase rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia diatas 80%	100%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	4 laporan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	29 laporan
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA yang disusun	2 dokumen
	Persentase rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah lingkup bidang perkonomian dan SDA di atas 80%	100%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 dokumen

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	4 laporan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	2 laporan
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun	3 dokumen
	Persentase rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan di atas 80%	100%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 dokumen
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	1 laporan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur	1 laporan
Tujuan : Meningkatkan pemanfaatan kelitbangan/inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan / inovasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan / perencanaan	100%
Sasaran : Meningkatnya Diseminasi / Publikasi Kelitbangan / Inovasi dalam Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan / Inovasi Yang Dipublikasi / Didiseminasi	100%
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah dokumen kelitbangan/ inovasi yang dihasilkan	4 dokumen
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	2 dokumen

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	2 laporan
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen inovasi dan teknologi yang disusun	2 dokumen
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	2 dokumen

2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek yang diambil dari Sasaran dan Indikator Sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, terdiri dari 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Mendukung Tercapainya Visi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai LHE Akuntabilitas Kinerja yang diterbitkan oleh Inspektorat	LHE dari Inspektorat
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		Menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	Aplikasi Penilaian SKM
2	Meningkatnya konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%	%	$\frac{\sum Capaian\ sasaran\ \ pembangunan\ RPJMD\ > 80\%}{\sum Sasaran\ \ pembangunan\ RPJMD} \ x\ 100\%$	Dokumen Evaluasi RKPD
		Persentase keselarasan RKPD dan Renja perangkat daerah	%	$\frac{\sum Jumlah\ kegiatan\ Renja\ OPD\ yang\ sesuai\ dengan\ RKPD}{\sum Jumlah\ kegiatan\ RKPD} \ x\ 100\%$	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
3	Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah	Persentase hasil kelitbangan/ inovasi yang dipublikasi/ didiseminasi	%	$\frac{\sum Hasil\ kelitbangan/inovasi\ yang\ \ dipublikasi/didiseminasi\ \ tahun\ berkenaan}{\sum\ Hasil\ kelitbangan\ \ atau\ inovasi\ \ yang\ dihasilkan} \times 100\%$	Laporan Kinerja Bidang P4EP
		Persentase riset dan inovasi yang dimanfaatkan	%	$\frac{\sum Jumlah\ riset\ dan\ inovasi\ yang\ dimanfaatkan\ pada\ tahun\ n}{\sum Jumlah\ total\ riset\ dan\ inovasi\ yang\ tersedia\ pada\ tahun\ n} x\ 100\%$	

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan anggaran. Target kinerja merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome.

Perjanjian Kinerja tingkat perangkat daerah pada tahun 2025 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek pada bulan Januari 2025, kemudian dilakukan perubahan pada bulan September 2025. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah adanya perubahan anggaran pada PAPBD Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.3 Perbandingan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1.	Nilai (Kategori Nilai) Sakip	94,30 (AA)	94,30 (AA)
		2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	97,52	97,52

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1.	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%	100%	100%
3.	Meningkatnya diseminasi/publikasi kelitbangan/inovasi dalam pembangunan daerah	1.	Persentase hasil kelitbangan/inovasi yang dipublikasi/didiseminasi	100%	100%

Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 setelah perubahan yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 ini.

2.4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, berikut ini disajikan besaran pagu anggaran serta perubahannya yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja ini sebagai berikut :

Tabel 2.4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)	Tagging PPRG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**7.643.535.990,99**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.857.691,76	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.655.157.501,82	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.045.500,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.600.001,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	255.153.646,82	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	177.832.789,70	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.763.025,00	

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)	Tagging PPRG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.125.834,89	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**817.459.232,17**	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	761.389.904,87	V
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	56.069.327,30	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**1.054.802.025,64**	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	302.518.197,33	V
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	253.327.616,72	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	498.956.211,59	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**1.697.837.921,20**	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	407.837.921,20	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.290.000.000,00	
JUMLAH	**11.213.635.170,00**	

Program dan kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender yang dibuktikan dalam Anggaran Responsif Gender antara lain :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.817.459.232,17. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Musrenbang RKPD dengan data sebanyak 305 peserta yang terdiri dari Perwakilan Provinsi, unsur Forkopimda, perwakilan pemerintah daerah perbatasan, seluruh perangkat daerah, unsur pemerintah/desa (Kepala Desa, TP-PKK Desa/Kelurahan, BPD, tokoh Masyarakat) dan unsur Masyarakat (organisasi Masyarakat, perwakilan disabilitas, forum anak). Anggaran dalam kegiatan ini sejumlah Rp.52.281.000,00.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.1.054.802.025,64. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Musrenakeren dengan data sebanyak 167 peserta yang terdiri dari Perwakilan Provinsi, unsur Forkopimda, perwakilan pemerintah daerah perbatasan, seluruh perangkat daerah, unsur pemerintah/desa (Kepala Desa, TP-PKK Desa/Kelurahan, BPD, tokoh Masyarakat) dan unsur Masyarakat (organisasi Masyarakat, perwakilan disabilitas, forum anak). Anggaran dalam kegiatan ini sejumlah Rp.22.899.300,00.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja 2025

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek merupakan kinerja tahun ke-5 (tahun terakhir) pada periode Renstra Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek.

Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
				I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) Sakip	94,30 (AA)	-	-	-	94,57	94,57	100,29
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	97,52	97,70	97,64	97,88	97,61	97,61	100,09
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%	100%	-	-	-	100%*)	100%*)	100%*)
3.	Meningkatnya diseminasi/publikasi kelitbangan/inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan/inovasi yang dipublikasi/ didiseminasi	100%	-	-	-	100%	100%	100

*) data terakhir saat finalisasi laporan disusun

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 target;
2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 target;
3) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target;

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas tercapai. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100,09% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis.

Secara umum, dapat kami sampaikan beberapa faktor pendorong maupun faktor penghambat yang dapat diidentifikasi dalam rangka mencapai target sasaran yang telah diperjanjikan. Faktor – faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

A. Faktor pendorong :

1. Komitmen pimpinan untuk melaksanakan SAKIP
2. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang tupoksi Bappedalitbang yang relatif cukup
3. Tersedianya sistem informasi dalam mendukung proses perencanaan (SIPD dan NGGALEK PLAN) dan pengendalian evaluasi (SIMONEV)
4. Mulai tumbuhnya budaya inovasi di kalangan ASN Bappedalitbang
5. Tersedianya sistem informasi internal Badan Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek dalam mendukung pengendalian evaluasi perencanaan tahunan (Ruang Kerja)

B. Faktor penghambat :

1. Belum optimalnya kesepahaman para perencana OPD teknis terkait penyediaan data dan informasi terkait realisasi pelaksanaan pembangunan

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3.2 Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) Sakip	91,39 (AA)	91,89 (AA)	92,39 (AA)	94,00 (AA)	94,30 (AA)	91,39 (AA)	92,19 (AA)	93,94 (AA)	94,29 (AA)	94,57 (AA)	100,00	100,33	101,68	101,51	100,29
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	88	88,5	89	97,26	97,52	88,28	88,62	97,25	97,47	97,61	100,32	100,14	109,27	100,22	100,09
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%	100%	100%	100%	100%	100%	94,35 %	90,68 %	93,33 %	91,03 %	100%*)	94,35	90,68	93,33	91,03	100*)
Meningkatnya diseminasi/ publikasi kelitbangan /inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan/ inovasi yang dipublikasi/ didiseminasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100

*) data terakhir pada saat finalisasi laporan ini disusun

3.2.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek

3.2.1.1 Nilai (Kategori Nilai) Sakip

Indikator kinerja sasaran strategis yang pertama adalah Nilai (Kategori Nilai) Sakip yang telah disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Trenggalek. Nilai ini adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian indikator ini terus meningkat mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2025.



	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
Target	91,39	91,89	92,39	94	94,3
Realisasi	91,39	92,19	93,94	94,29	94,57

Gambar 3.1 Grafik Target dan Realisasi Nilai (Kategori Nilai) Sakip 2021-2025

Sasaran strategis pertama Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dengan indikator Nilai (Kategori Nilai) Sakip pada tahun 2025 dengan target 94,30 (AA) terealisasi 94,57 (AA) sehingga capaiannya adalah 100,29. Perbandingan

dengan capaian pada tahun sebelumnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3 Perbandingan Target Realisasi Indikator 1 Sasaran 1 Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien				
INDIKATOR KINERJA	Nilai (Kategori Nilai) Sakip				
TAHUN	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
TARGET	91,39 (AA)	91,89 (AA)	92,39 (AA)	94,00 (AA)	94,30 (AA)
REALISASI	91,39 (AA)	92,19 (AA)	93,94 (AA)	94,29 (AA)	94,57 (AA)
CAPAIAN (%)	100,00	100,33	101,68	101,51	100,29

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

1) Seluruh rekomendasi perbaikan dari evaluator internal telah dipenuhi sesuai ketentuan/jadwal
2) Komitmen pimpinan dan para ASN untuk implementasi SAKIP

Kendala/tantangan yang ditemui adalah :

1) Belum optimalnya kesepahaman penerapan SAKIP dari evaluator SAKIP Kabupaten Trenggalek
2) Belum terbiasanya seluruh ASN untuk menerapkan aspek dalam SAKIP sehingga masih perlu terus diingatkan

Upaya untuk meningkatkan/mempertahankan kinerja adalah :

1) Memastikan indikator penilaian SAKIP bisa diimplementasikan oleh seluruh Pegawai Bappedalitbang
2) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Tim Evaluator Sakip

3.2.1.2 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran strategis pertama Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 dengan target 97,52 terealisasi 97,61 Sehingga capaiannya adalah 100,09. Perbandingan dengan capaian pada tahun sebelumnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4 Perbandingan Target Realisasi Indikator 2 Sasaran 2 Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien				
INDIKATOR KINERJA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat				
TAHUN	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
TARGET	88	88,5	89	97,26	97,52
REALISASI	88,28	88,62	97,25	97,47	97,61
CAPAIAN (%)	100,32	100,14	109,27	100,22	100,09

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

1) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang relatif tercukupi

Kendala/tantangan yang ditemui adalah :

1) Penerima layanan terkadang tidak berkenan mengisi
2) Belum seluruh bidang menyarankan kepada penerima layanan untuk mengisi survei SKM

Upaya untuk meningkatkan/mempertahankan kinerja adalah :

1) Memastikan penerima layanan bersedia mengisi form SKM
2) Memperbaiki segala masukan yang disampaikan pada hasil SKM



Gambar 3.2 Grafik Target dan Realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 2021-2025

3.2.2 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek

Tabel 3.5 Perbandingan Target Realisasi Indikator 1 Sasaran 2 Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah				
INDIKATOR KINERJA	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%				
TAHUN	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%
REALISASI	94,35 %	90,68 %	93,33 %	91,03 %	100%
CAPAIAN (%)	94,35	90,68	93,33	91,03	100%

Pada sasaran “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah” dengan indikator Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%. Dimana dengan indikator tersebut akan menunjukkan kinerja Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek dalam mengawal perencanaan pembangunan di Kabupaten Trenggalek. Sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD tersebut telah dijabarkan ke tujuan, sasaran, program,

kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Renstra Perangkat Daerah. Sehingga dengan mengawal capaian kinerja sasaran pembangunan berarti mengawal kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah Ketersediaan sistem informasi dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah (SIPD dan NGGALEK PLAN) dan proses pengendalian evaluasi (SIMONEV)

Kendala/tantangan yang ditemui adalah :

1) Dokumen petunjuk teknis perencanaan dari pemerintah pusat sering kali terlambat penerbitannya dan sering berubah sehingga mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam proses perencanaan pembangunan daerah
2) Belum optimalnya/masih terdapat kendala (bug) pada sistem informasi yang bersumber dari pemerintah pusat (SIPD)

Upaya untuk meningkatkan/memperbaiki kinerja adalah:

1) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait
2) Meningkatkan kapasitas SDM Perencana
3) Melakukan Sinkronisasi dan Harmonisasi baik dengan Perangkat Daerah di Internal Pemerintah Kabupaten Trenggalek, maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Nasional

3.2.3 Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya diseminasi/publikasi kelitbangan/ inovasi dalam pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek

Pada sasaran “Meningkatnya diseminasi/publikasi kelitbangan/ inovasi dalam pembangunan daerah” dengan indikator Persentase hasil kelitbangan/ inovasi yang dipublikasikan /didiseminasi. Dengan indikator tersebut akan

menunjukkan kinerja Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek dalam mengawal kinerja kelitbangan di Kabupaten Trenggalek. Dari hasil perhitungan tersebut akan diketahui seberapa banyak, seberapa besar persentase hasil-hasil kelitbangan dan inovasi daerah yang dihasilkan dimanfaatkan sebagai dasar dalam penentuan kebijakan maupun perencanaan pembangunan daerah. Semakin besar nilai persentasenya maka hasil kelitbangan dan inovasi daerah disusun memang berdasarkan kebutuhan bukan keinginan.

Tabel 3.6 Perbandingan Target Realisasi Indikator 1 Sasaran 3 Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	**Meningkatnya diseminasi/publikasi kelitbangan/ inovasi dalam pembangunan daerah**				
INDIKATOR KINERJA	**Persentase hasil kelitbangan/ inovasi yang dipublikasikan /didiseminasi**				
TAHUN	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025 (Sasaran Jangka Menengah)**
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%
REALISASI	100%	100%	100%	100%	100%
CAPAIAN (%)	100	100	100	100	100



Gambar 3.3 Grafik Target dan Realisasi Persentase hasil kelitbangan/inovasi

yang dipublikasi/didiseminasi Tahun 2021-2025

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

1) Peran kepala daerah dalam mendorong inovasi sangat luar biasa, visi dan misi yang jelas sebagai landasan inovasi, gaya kepemimpinan yang menggerakkan seluruh masyarakat untuk berinovasi, serta komitmen untuk mendorong inovasi di semua sektor;
2) Fasilitasi penuh untuk ekosistem inovasi daerah oleh Bappeda yaitu fasilitasi pembuatan inovasi, penyusunan proposal inovasi dan data dukung melalui warung teknologi, penyusunan regulasi inovasi daerah, fasilitas penyusunan monitoring dan evaluasi inovasi daerah, fasilitasi publikasi inovasi daerah;
3) Pemanfaatan Artificial Intelegence (AI) dalam penyusunan proposal inovasi, kematangan inovasi dan penyusunan dokumen riset lainnya;
4) Kerja sama lintas sektor (Akademisi, Pelaku usaha, Komunitas, Media, dan Pemerintah);
5) Kerja sama replikasi inovasi dengan daerah sekitar seperti Ponorogo, Ngawi, Wonogiri, Tulungagung, Sampang dan Situbondo;
6) Tersedia laman profil inovasi daerah.
7) Komitmen pimpinan daerah dan Bapperida dalam mendorong kebijakan berbasis riset.
8) Ketersediaan data sektoral dan penguatan Satu Data Daerah.
9) Kolaborasi dengan perguruan tinggi/lembaga riset serta pemanfaatan hasil survei dan kajian.

Kendala/tantangan yang ditemui adalah :

1) Belum tersedianya SDM peneliti/perekayasa/analis pemanfaatan iptek;
2) Infrastruktur riset dan inovasi yang kurang (laboratorium);
3) Minimnya fasilitasi riset dan inovasi untuk percepatan pembangunan daerah;
4) Belum adanya insentif / kemudahan dalam melakukan riset dan inovasi;
5) Belum adanya regulasi Inovasi yang mengatur tentang pengembangan ekosistem inovasi;
6) Kurangnya peningkatan implementasi hasil riset dan inovasi daerah yang telah diciptakan;
7) Belum terealisasinya penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan di daerah;
8) Belum terealisasinya adaptasi dan penyelarasan isu internasional terhadap kegiatan inovasi di daerah serta belum terealisasinya kerja sama internasional dalam kegiatan riset di daerah;
9) Kualitas dan konsistensi data antar-OPD belum merata.
10) Budaya evidence-based policy belum sepenuhnya terinternalisasi di seluruh perangkat daerah.
11) Keterbatasan SDM analis kebijakan dan anggaran riset.

Upaya untuk meningkatkan/mempertahankan kinerja adalah:

1) Mengupayakan/mempertahankan dan meningkatkan kemantapan inovasi.
2) Menyusun regulasi yang mengamanatkan masing-masing lembaga/perangkat daerah minimal 3 (tiga) inovasi

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian dengan Kabupaten/Kota Lain

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kabupaten/Kota Lain	Persentase Capaian (dibandingkan dengan kota lain)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) Sakip	94,57	85,09	111,14 (Realisasi dibandingkan dengan nilai SAKIP Bappeda Kabupaten Mojokerto)
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	97,61	89,62	108,91 (Realisasi dibandingkan dengan nilai IKM Bappeda Kabupaten Bojonegoro)
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%	100%*)	-	Belum ada bencmarking daerah yang menggunakan indikator yang sama
3.	Meningkatnya diseminasi/publikasi kelitbangan/inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan/inovasi yang dipublikasi/ didiseminasi	100%	-	Belum ada bencmarking daerah yang menggunakan indikator yang sama

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien	1. Nilai (Kategori Nilai) Sakip 2. Nilai indeks kepuasan masyarakat	1.100,29% 2.100,09%	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi**	**110,30%**	**Menunjang**
					Persentase nilai aset dalam kondisi baik	**89,75%**	**Menunjang**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**Menunjang**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	136,08%	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum perangkat daerah yang diselesaikan	105%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	120%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	Menunjang
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%	100%	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Jumlah dokumen pengelolaan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun sesuai aturan**	**100%**	**Menunjang**
					Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	**100%**	**Menunjang**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	**100%**	**Menunjang**
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen RKPD yang disusun dan ditetapkan dengan peraturan bupati	100%	Menunjang
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun	100%	Menunjang
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah pada masing-masing bidang di atas 80%**	**91,70%**	**Menunjang**
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Disusun	**100%**	**Menunjang**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia diatas 80%	96,45%	Menunjang
					Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun	100%	Menunjang
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah lingkup Bidang Perkonomian dan SDA di atas 80%	83,33%	Menunjang
					Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	100%	Menunjang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan di atas 80%	85,29%	Menunjang
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	100%	Menunjang
3	Meningkatnya diseminasi/publikasi kelitbangan/ inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan/ inovasi yang dipublikasikan /didiseminasi	100%	**Program penelitian dan pengembangan daerah**	**Jumlah dokumen kelitbangan/ inovasi yang dihasilkan**	**100%**	**Menunjang**
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun	100%	Menunjang
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen Inovasi dan Teknologi yang disusun	100%	Menunjang

Program yang capaian kinerja diatas 100 % adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, karena metode pengukurannya adalah akumulasi dari capaian indikator kegiatan. Terdapat dua kegiatan yang capaiannya diatas 100 % sehingga mempengaruhi capaian indikator program.

Kegiatan yang capaian kinerja diatas 100 % adalah

1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, karena capaian sub kegiatan dibawahnya ada yang capaian indikator melebihi 100%.
2 Administrasi Umum Perangkat Daerah karena capaian sub kegiatan dibawahnya ada yang capaian indikator melebihi 100%.
3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, hal ini dikarenakan terdapat target yang belum disesuaikan dikarenakan perubahan anggaran sehingga capaian melebihi 100%.

Kegiatan yang capaian kinerja dibawah 85% adalah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) karena ada 9 program OPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang capaiannya dibawah 80%. Ada 6 SKPD yang memiliki capaian indikator program dibawah 80%.

3.3 Capaian Kinerja Lainnya

3.3.1 Capaian kinerja indikator tujuan

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek memiliki 3 tujuan dan 3 indikator tujuan. Namun untuk tujuan pertama dan indikatornya sudah tidak berlaku karena ada perubahan metode pengukuran Reformasi Birokrasi yang sebelumnya terdapat basis perangkat daerah namun kini tidak ada, hanya berbasis instansi.

Tabel 3.9 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2020 (Baseline)	Target 2025	Realisasi 2025 (Akhir Periode Renstra)	Capaian (%)
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan pemanfaatan kelitbangan/inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan/inovasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan/perencanaan	100%	100%	100%	100%

Tujuan berikutnya adalah meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja Indeks Perencanan dengan capaian 100%. Indeks perencanaan adalah alat ukur kualitas perencanaan pembangunan yang menilai tingkat konsistensi, partisipasi, dan integrasi dokumen perencanaan (Renstra/Renja/RKP) antara pemerintah pusat dan daerah. Indeks ini bertujuan memastikan perencanaan berbasis data, terstruktur, dan terukur untuk mencapai tujuan pembangunan.

Faktor pendukung ketercapaian indeks perencanaan adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan, termasuk keselarasan antara RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah;
2) Penguatan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor, sehingga program dan kegiatan lebih terintegrasi serta mendukung prioritas pembangunan daerah;

3) Optimalisasi pemanfaatan aplikasi perencanaan (SIPD)
4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga perbaikan dapat dilakukan lebih dini apabila ditemukan deviasi

Sedangkan faktor penghambat ketercapaian indeks perencanaaan adalah :

1) Perubahan regulasi atau kebijakan nasional yang dinamis, sehingga memerlukan penyesuaian cepat dalam dokumen perencanaan daerah
2) Aplikasi SIPD yang masih sering error

Tujuan yang ketiga adalah Meningkatkan pemanfaatan kelitbangan/inovasi dalam pembangunan daerah dengan indikator Persentase hasil kelitbangan/inovasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan/perencanaan dengan capaian 100%. Faktor pendukung ketercapaian tersebut adalah :

1) Komitmen pimpinan daerah dan Bapperida dalam mendorong kebijakan berbasis riset.
2) Ketersediaan data sektoral dan penguatan Satu Data Daerah.
3) Kolaborasi dengan perguruan tinggi/lembaga riset serta pemanfaatan hasil survei dan kajian.

Sedangkan faktor penghambat ketercapaian indeks perencanaaan adalah :

1) Kualitas dan konsistensi data antar-OPD belum merata.
2) Budaya evidence-based policy belum sepenuhnya terinternalisasi di seluruh perangkat daerah.
3) Keterbatasan SDM analis kebijakan dan anggaran riset.

3.3.2 Capaian kinerja terkait pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Program yang mendukung implementasi

pengarusutamaan gender di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah antara lain :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan sub-kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, kegiatan yang dilaksanakan adalah Musrenbang, dengan kehadiran perempuan sebesar 83 orang dan laki-laki 222 orang. Kegiatan ini terlaksana dengan anggaran responsif gender sebesar Rp.52.281.000,00 dengan realisasi sebesar 100%. Capaian kegiatan ini sebesar 100%
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), kegiatan yang dilaksanakan adalah Musrenakeren dengan kehadiran perempuan sebesar 59 orang dan laki-laki 108 orang. Kegiatan ini terlaksana dengan anggaran responsif gender sebesar Rp.36.224.300,00 dengan realisasi sebesar 100%. Capaian kegiatan ini sebesar 100%

3.4 Realisasi Anggaran

Anggaran Bappedalitbang tahun 2025 adalah sebesar Rp.11.213.635.170,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp.10.998.043.084,60 atau sebesar 98,08%. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Tahun 2025

PROGRAM-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**7.643.535.990,99**	**7.470.687.600,00**	**97,74**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.857.691,76	6.830.736,00	99,61
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.655.157.501,82	6.510.238.897,00	97,82
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.045.500,00	15.524.000,00	96,75
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.600.001,00	11.600.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	255.153.646,82	252.675.422,00	99,03
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	177.832.789,70	176.229.172,00	99,10
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.763.025,00	293.263.455,00	93,77
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.125.834,89	204.325.918,00	98,17
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**817.459.232,17**	**811.007.901,00**	**99,21**
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	761.389.904,87	756.175.202,00	99,32
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	56.069.327,30	54.832.699,00	97,79
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**1.054.802.025,64**	**1.028.763.593,00**	**97,53**
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	302.518.197,33	294.393.174,00	97,31
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	253.327.616,72	242.601.678,00	95,77
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	498.956.211,59	491.768.741,00	98,56
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**1.697.837.921,20**	**1.687.583.990,60**	**99,40**
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	407.837.921,20	401.281.270,60	98,39
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.290.000.000,00	1.286.302.720,00	99,71
TOTAL	**11.213.635.170,00**	**10.998.043.084,60**	**98,08**

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) Sakip	94,30 (AA)	94,57 (AA)	100,29%	7.643.535.990,99	7.470.687.600,00	97,74
		Nilai indeks kepuasan masyarakat	97,52	97,61	100,09%			
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%	100%	100%*)	100%*)	1.872.261.257,81	1.839.771.494	98,26%
3.	Meningkatnya diseminasi/publikasi kelitbangan/ inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan/inovasi yang dipublikasikan/didiseminasi	100%	100%	100%	1.697.837.921,20	1.687.583.990,60	99,40

*) data terakhir saat finalisasi laporan disusun

Tabel 3.12 Penghitungan Efisiensi

No.	Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Presentase Capaian	Rata-rata presentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi Anggaran	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) Sakip	94,30 % (AA)	94,57 % (AA)	100,29%	100,19%	7.643.535.990,99	7.470.687.600,00	97,74	1,03
		Nilai indeks kepuasan masyarakat	97,52	97,61	100,09%					
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%	100%	100*)	100%	100%	1.872.261.257,81	1.839.771.494	98,26%	1,02**)
3	Meningkatnya diseminasi/ publikasi kelitbangan/ inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan/inovasi yang dipublikasikan /didiseminasi	100%	100%	100%	100%	1.697.837.921,20	1.687.583.990,60	99,40	1,01

*) data terakhir saat finalisasi laporan disusun

**) efisiensi dihitung dengan realisasi kinerja diambil pada saat finalisasi laporan disusun

Berdasarkan perhitungan perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran sasaran tahun 2025 sebagaimana tabel 3.12 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek, dari 3 sasaran mencapai rata-rata sebesar 100,06%. Sedangkan capaian serapan anggaran Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek dari 3 sasaran mencapai rata-rata sebesar 98,08%. Dengan melihat kondisi tersebut maka penggunaan anggaran efisien karena perhitungan efisiensi dari ketiga sasaran adalah lebih besar dari 1.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2025 ini bahwa target tujuan dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek berjalan optimal dan efisien, hal ini bisa terlihat sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek tahun 2025 menurut rata-rata pencapaiannya dapat dikatakan berhasil, yakni sebesar 100,06%;
2. Capaian realisasi anggaran Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek tahun 2025 menurut rata-rata pencapaiannya dapat dikatakan berhasil, yakni sebesar 98,08%.

Untuk hasil capaian yang lebih baik di tahun-tahun mendatang, perlu adanya upaya-upaya perbaikan antara lain :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
3. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, diantaranya melalui kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis.

Upaya ke depan yang akan dilakukan dalam mendukung Pengarusutamaan Gender antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman seluruh bidang terkait dengan Pengarustamaan Gender
2. Menyediakan fasilitas yang ramah anak, perempuan dan disabilitas seperti ruang laktasi, ram jalan, toilet terpisah laki-laki dan perempuan
3. Kesetaraan dalam karir, seperti pengambilan keputusan dan promosi jabatan

4. Perlindungan dari kekerasan dan pelecehan baik verbal maupun fisik terhadap pegawai perempuan

Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2025 ini disusun berdasarkan data capaian realisasi kinerja dan anggaran sampai Desember 2025.

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JL. KH. Wahid Hasyim No. 5 Telp. (0355) 791121 Ngantru, Trenggalek, Jawa Timur
https://bappedalitbang.trenggalekkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes.**
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**
Jabatan : BUPATI TRENGGALEK

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 8 Januari 2025

BUPATI TRENGGALEK selaku Pihak Kedua,	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK selaku Pihak Pertama,
MOCHAMAD NUR ARIFIN	**dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes.** Pembina Utama Muda NIP. 196703311996032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) Sakip	94,30 % (AA)
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	97,52
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%	100%
3	Meningkatnya diseminasi/publikasi kelitbangan/inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan/inovasi yang dipublikasi/didiseminasi	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.606.654.549	APBD Kab. Trenggalek
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.303.280.700	APBD Kab. Trenggalek
3.	Prgram Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.211.989.500	APBD Kab. Trenggalek
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	515.422.070	APBD Kab. Trenggalek
	JUMLAH	**11.637.346.820**	

Trenggalek, 6 Januari 2025

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
selaku
Pihak Pertama,

dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 196703311996032003

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JL. KH. Wahid Hasyim No. 5 Telp. (0355) 791121 Ngantru, Trenggalek, Jawa Timur
https://bappedalitbang.trenggalekkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes.**
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**
Jabatan : BUPATI TRENGGALEK

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 26 September 2025

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
selaku
Pihak Pertama,

dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 196703311996032003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) Sakip	94,30 % (AA)
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	97,52
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%	100%
3	Meningkatnya diseminasi/publikasi kelitbangan/inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan/inovasi yang dipublikasi/didiseminasi	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.643.535.990,99	PAPBD Kab. Trenggalek
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	817.459.232,17	PAPBD Kab. Trenggalek
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.054.802.025,64	PAPBD Kab. Trenggalek
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.697.837.921,20	PAPBD Kab. Trenggalek
	JUMLAH	**11.213.635.170,00**	

Trenggalek, 28 September 2025

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
selaku
Pihak Pertama,

dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 196703311996032003

3.2.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek

3.2.1.1 Nilai (Kategori Nilai) Sakip

Indikator kinerja sasaran strategis yang pertama adalah Nilai (Kategori Nilai) Sakip yang telah disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Trenggalek. Nilai ini adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian indikator ini terus meningkat mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2025.



	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
Target	91,39	91,89	92,39	94	94,3
Realisasi	91,39	92,19	93,94	94,29	94,57

Gambar 3.1 Grafik Target dan Realisasi Nilai (Kategori Nilai) Sakip 2021-2025

Sasaran strategis pertama Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dengan indikator Nilai (Kategori Nilai) Sakip pada tahun 2025 dengan target 94,30 (AA) terealisasi 94,57 (AA) sehingga capaiannya adalah 100,29. Perbandingan

dengan capaian pada tahun sebelumnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3 Perbandingan Target Realisasi Indikator 1 Sasaran 1 Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien				
INDIKATOR KINERJA	Nilai (Kategori Nilai) Sakip				
TAHUN	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
TARGET	91,39 (AA)	91,89 (AA)	92,39 (AA)	94,00 (AA)	94,30 (AA)
REALISASI	91,39 (AA)	92,19 (AA)	93,94 (AA)	94,29 (AA)	94,57 (AA)
CAPAIAN (%)	100,00	100,33	101,68	101,51	100,29

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

1) Seluruh rekomendasi perbaikan dari evaluator internal telah dipenuhi sesuai ketentuan/jadwal
2) Komitmen pimpinan dan para ASN untuk implementasi SAKIP

Kendala/tantangan yang ditemui adalah :

1) Belum optimalnya kesepahaman penerapan SAKIP dari evaluator SAKIP Kabupaten Trenggalek
2) Belum terbiasanya seluruh ASN untuk menerapkan aspek dalam SAKIP sehingga masih perlu terus diingatkan

Upaya untuk meningkatkan/mempertahankan kinerja adalah :

1) Memastikan indikator penilaian SAKIP bisa diimplementasikan oleh seluruh Pegawai Bappedalitbang
2) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Tim Evaluator Sakip

3.2.1.2 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran strategis pertama Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 dengan target 97,52 terealisasi 97,61 Sehingga capaiannya adalah 100,09. Perbandingan dengan capaian pada tahun sebelumnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4 Perbandingan Target Realisasi Indikator 2 Sasaran 2 Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien				
INDIKATOR KINERJA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat				
TAHUN	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
TARGET	88	88,5	89	97,26	97,52
REALISASI	88,28	88,62	97,25	97,47	97,61
CAPAIAN (%)	100,32	100,14	109,27	100,22	100,09

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

1) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang relatif tercukupi

Kendala/tantangan yang ditemui adalah :

1) Penerima layanan terkadang tidak berkenan mengisi
2) Belum seluruh bidang menyarankan kepada penerima layanan untuk mengisi survei SKM

Upaya untuk meningkatkan/mempertahankan kinerja adalah :

1) Memastikan penerima layanan bersedia mengisi form SKM
2) Memperbaiki segala masukan yang disampaikan pada hasil SKM



Gambar 3.2 Grafik Target dan Realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 2021-2025

3.2.2 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek

Tabel 3.5 Perbandingan Target Realisasi Indikator 1 Sasaran 2 Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah				
INDIKATOR KINERJA	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%				
TAHUN	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%
REALISASI	94,35 %	90,68 %	93,33 %	91,03 %	100%
CAPAIAN (%)	94,35	90,68	93,33	91,03	100%

Pada sasaran “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah” dengan indikator Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%. Dimana dengan indikator tersebut akan menunjukkan kinerja Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek dalam mengawal perencanaan pembangunan di Kabupaten Trenggalek. Sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD tersebut telah dijabarkan ke tujuan, sasaran, program,

kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Renstra Perangkat Daerah. Sehingga dengan mengawal capaian kinerja sasaran pembangunan berarti mengawal kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah Ketersediaan sistem informasi dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah (SIPD dan NGGALEK PLAN) dan proses pengendalian evaluasi (SIMONEV)

Kendala/tantangan yang ditemui adalah :

1) Dokumen petunjuk teknis perencanaan dari pemerintah pusat sering kali terlambat penerbitannya dan sering berubah sehingga mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam proses perencanaan pembangunan daerah
2) Belum optimalnya/masih terdapat kendala (bug) pada sistem informasi yang bersumber dari pemerintah pusat (SIPD)

Upaya untuk meningkatkan/memperbaiki kinerja adalah:

1) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait
2) Meningkatkan kapasitas SDM Perencana
3) Melakukan Sinkronisasi dan Harmonisasi baik dengan Perangkat Daerah di Internal Pemerintah Kabupaten Trenggalek, maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Nasional

3.2.3 Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya diseminasi/publikasi kelitbangan/ inovasi dalam pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek

Pada sasaran “Meningkatnya diseminasi/publikasi kelitbangan/ inovasi dalam pembangunan daerah” dengan indikator Persentase hasil kelitbangan/ inovasi yang dipublikasikan /didiseminasi. Dengan indikator tersebut akan

menunjukkan kinerja Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek dalam mengawal kinerja kelitbangan di Kabupaten Trenggalek. Dari hasil perhitungan tersebut akan diketahui seberapa banyak, seberapa besar persentase hasil-hasil kelitbangan dan inovasi daerah yang dihasilkan dimanfaatkan sebagai dasar dalam penentuan kebijakan maupun perencanaan pembangunan daerah. Semakin besar nilai persentasenya maka hasil kelitbangan dan inovasi daerah disusun memang berdasarkan kebutuhan bukan keinginan.

Tabel 3.6 Perbandingan Target Realisasi Indikator 1 Sasaran 3 Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	**Meningkatnya diseminasi/publikasi kelitbangan/ inovasi dalam pembangunan daerah**				
INDIKATOR KINERJA	**Persentase hasil kelitbangan/ inovasi yang dipublikasikan /didiseminasi**				
TAHUN	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025 (Sasaran Jangka Menengah)**
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%
REALISASI	100%	100%	100%	100%	100%
CAPAIAN (%)	100	100	100	100	100



Gambar 3.3 Grafik Target dan Realisasi Persentase hasil kelitbangan/inovasi

yang dipublikasi/didiseminasi Tahun 2021-2025

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

1) Peran kepala daerah dalam mendorong inovasi sangat luar biasa, visi dan misi yang jelas sebagai landasan inovasi, gaya kepemimpinan yang menggerakkan seluruh masyarakat untuk berinovasi, serta komitmen untuk mendorong inovasi di semua sektor;
2) Fasilitasi penuh untuk ekosistem inovasi daerah oleh Bappeda yaitu fasilitasi pembuatan inovasi, penyusunan proposal inovasi dan data dukung melalui warung teknologi, penyusunan regulasi inovasi daerah, fasilitas penyusunan monitoring dan evaluasi inovasi daerah, fasilitasi publikasi inovasi daerah;
3) Pemanfaatan Artificial Intelegence (AI) dalam penyusunan proposal inovasi, kematangan inovasi dan penyusunan dokumen riset lainnya;
4) Kerja sama lintas sektor (Akademisi, Pelaku usaha, Komunitas, Media, dan Pemerintah);
5) Kerja sama replikasi inovasi dengan daerah sekitar seperti Ponorogo, Ngawi, Wonogiri, Tulungagung, Sampang dan Situbondo;
6) Tersedia laman profil inovasi daerah.
7) Komitmen pimpinan daerah dan Bapperida dalam mendorong kebijakan berbasis riset.
8) Ketersediaan data sektoral dan penguatan Satu Data Daerah.
9) Kolaborasi dengan perguruan tinggi/lembaga riset serta pemanfaatan hasil survei dan kajian.

Kendala/tantangan yang ditemui adalah :

1) Belum tersedianya SDM peneliti/perekayasa/analis pemanfaatan iptek;
2) Infrastruktur riset dan inovasi yang kurang (laboratorium);
3) Minimnya fasilitasi riset dan inovasi untuk percepatan pembangunan daerah;
4) Belum adanya insentif / kemudahan dalam melakukan riset dan inovasi;
5) Belum adanya regulasi Inovasi yang mengatur tentang pengembangan ekosistem inovasi;
6) Kurangnya peningkatan implementasi hasil riset dan inovasi daerah yang telah diciptakan;
7) Belum terealisasinya penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan di daerah;
8) Belum terealisasinya adaptasi dan penyelarasan isu internasional terhadap kegiatan inovasi di daerah serta belum terealisasinya kerja sama internasional dalam kegiatan riset di daerah;
9) Kualitas dan konsistensi data antar-OPD belum merata.
10) Budaya evidence-based policy belum sepenuhnya terinternalisasi di seluruh perangkat daerah.
11) Keterbatasan SDM analis kebijakan dan anggaran riset.

Upaya untuk meningkatkan/mempertahankan kinerja adalah:

1) Mengupayakan/mempertahankan dan meningkatkan kemantapan inovasi.
2) Menyusun regulasi yang mengamanatkan masing-masing lembaga/perangkat daerah minimal 3 (tiga) inovasi

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian dengan Kabupaten/Kota Lain

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kabupaten/Kota Lain	Persentase Capaian (dibandingkan dengan kota lain)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) Sakip	94,57	85,09	111,14 (Realisasi dibandingkan dengan nilai SAKIP Bappeda Kabupaten Mojokerto)
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	97,61	89,62	108,91 (Realisasi dibandingkan dengan nilai IKM Bappeda Kabupaten Bojonegoro)
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%	100%*)	-	Belum ada bencmarking daerah yang menggunakan indikator yang sama
3.	Meningkatnya diseminasi/publikasi kelitbangan/inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan/inovasi yang dipublikasi/ didiseminasi	100%	-	Belum ada bencmarking daerah yang menggunakan indikator yang sama

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien	1. Nilai (Kategori Nilai) Sakip 2. Nilai indeks kepuasan masyarakat	1.100,29% 2.100,09%	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi**	**110,30%**	**Menunjang**
					Persentase nilai aset dalam kondisi baik	**89,75%**	**Menunjang**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**Menunjang**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	136,08%	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum perangkat daerah yang diselesaikan	105%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	120%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	Menunjang
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%	100%	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Jumlah dokumen pengelolaan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun sesuai aturan**	**100%**	**Menunjang**
					Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	**100%**	**Menunjang**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	**100%**	**Menunjang**
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen RKPD yang disusun dan ditetapkan dengan peraturan bupati	100%	Menunjang
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun	100%	Menunjang
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah pada masing-masing bidang di atas 80%**	**91,70%**	**Menunjang**
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Disusun	**100%**	**Menunjang**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia diatas 80%	96,45%	Menunjang
					Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun	100%	Menunjang
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah lingkup Bidang Perkonomian dan SDA di atas 80%	83,33%	Menunjang
					Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	100%	Menunjang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan di atas 80%	85,29%	Menunjang
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	100%	Menunjang
3	Meningkatnya diseminasi/publikasi kelitbangan/ inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan/ inovasi yang dipublikasikan /didiseminasi	100%	**Program penelitian dan pengembangan daerah**	**Jumlah dokumen kelitbangan/ inovasi yang dihasilkan**	**100%**	**Menunjang**
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun	100%	Menunjang
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen Inovasi dan Teknologi yang disusun	100%	Menunjang

Program yang capaian kinerja diatas 100 % adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, karena metode pengukurannya adalah akumulasi dari capaian indikator kegiatan. Terdapat dua kegiatan yang capaiannya diatas 100 % sehingga mempengaruhi capaian indikator program.

Kegiatan yang capaian kinerja diatas 100 % adalah

1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, karena capaian sub kegiatan dibawahnya ada yang capaian indikator melebihi 100%.
2 Administrasi Umum Perangkat Daerah karena capaian sub kegiatan dibawahnya ada yang capaian indikator melebihi 100%.
3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, hal ini dikarenakan terdapat target yang belum disesuaikan dikarenakan perubahan anggaran sehingga capaian melebihi 100%.

Kegiatan yang capaian kinerja dibawah 85% adalah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) karena ada 9 program OPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang capaiannya dibawah 80%. Ada 6 SKPD yang memiliki capaian indikator program dibawah 80%.

3.3 Capaian Kinerja Lainnya

3.3.1 Capaian kinerja indikator tujuan

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek memiliki 3 tujuan dan 3 indikator tujuan. Namun untuk tujuan pertama dan indikatornya sudah tidak berlaku karena ada perubahan metode pengukuran Reformasi Birokrasi yang sebelumnya terdapat basis perangkat daerah namun kini tidak ada, hanya berbasis instansi.

Tabel 3.9 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2020 (Baseline)	Target 2025	Realisasi 2025 (Akhir Periode Renstra)	Capaian (%)
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan pemanfaatan kelitbangan/inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan/inovasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan/perencanaan	100%	100%	100%	100%

Tujuan berikutnya adalah meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja Indeks Perencanan dengan capaian 100%. Indeks perencanaan adalah alat ukur kualitas perencanaan pembangunan yang menilai tingkat konsistensi, partisipasi, dan integrasi dokumen perencanaan (Renstra/Renja/RKP) antara pemerintah pusat dan daerah. Indeks ini bertujuan memastikan perencanaan berbasis data, terstruktur, dan terukur untuk mencapai tujuan pembangunan.

Faktor pendukung ketercapaian indeks perencanaan adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan, termasuk keselarasan antara RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah;
2) Penguatan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor, sehingga program dan kegiatan lebih terintegrasi serta mendukung prioritas pembangunan daerah;

3) Optimalisasi pemanfaatan aplikasi perencanaan (SIPD)
4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga perbaikan dapat dilakukan lebih dini apabila ditemukan deviasi

Sedangkan faktor penghambat ketercapaian indeks perencanaaan adalah :

1) Perubahan regulasi atau kebijakan nasional yang dinamis, sehingga memerlukan penyesuaian cepat dalam dokumen perencanaan daerah
2) Aplikasi SIPD yang masih sering error

Tujuan yang ketiga adalah Meningkatkan pemanfaatan kelitbangan/inovasi dalam pembangunan daerah dengan indikator Persentase hasil kelitbangan/inovasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan/perencanaan dengan capaian 100%. Faktor pendukung ketercapaian tersebut adalah :

1) Komitmen pimpinan daerah dan Bapperida dalam mendorong kebijakan berbasis riset.
2) Ketersediaan data sektoral dan penguatan Satu Data Daerah.
3) Kolaborasi dengan perguruan tinggi/lembaga riset serta pemanfaatan hasil survei dan kajian.

Sedangkan faktor penghambat ketercapaian indeks perencanaaan adalah :

1) Kualitas dan konsistensi data antar-OPD belum merata.
2) Budaya evidence-based policy belum sepenuhnya terinternalisasi di seluruh perangkat daerah.
3) Keterbatasan SDM analis kebijakan dan anggaran riset.

3.3.2 Capaian kinerja terkait pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Program yang mendukung implementasi

pengarusutamaan gender di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah antara lain :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan sub-kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, kegiatan yang dilaksanakan adalah Musrenbang, dengan kehadiran perempuan sebesar 83 orang dan laki-laki 222 orang. Kegiatan ini terlaksana dengan anggaran responsif gender sebesar Rp.52.281.000,00 dengan realisasi sebesar 100%. Capaian kegiatan ini sebesar 100%
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), kegiatan yang dilaksanakan adalah Musrenakeren dengan kehadiran perempuan sebesar 59 orang dan laki-laki 108 orang. Kegiatan ini terlaksana dengan anggaran responsif gender sebesar Rp.36.224.300,00 dengan realisasi sebesar 100%. Capaian kegiatan ini sebesar 100%

3.4 Realisasi Anggaran

Anggaran Bappedalitbang tahun 2025 adalah sebesar Rp.11.213.635.170,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp.10.998.043.084,60 atau sebesar 98,08%. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Tahun 2025

PROGRAM-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**7.643.535.990,99**	**7.470.687.600,00**	**97,74**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.857.691,76	6.830.736,00	99,61
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.655.157.501,82	6.510.238.897,00	97,82
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.045.500,00	15.524.000,00	96,75
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.600.001,00	11.600.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	255.153.646,82	252.675.422,00	99,03
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	177.832.789,70	176.229.172,00	99,10
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.763.025,00	293.263.455,00	93,77
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.125.834,89	204.325.918,00	98,17
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**817.459.232,17**	**811.007.901,00**	**99,21**
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	761.389.904,87	756.175.202,00	99,32
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	56.069.327,30	54.832.699,00	97,79
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**1.054.802.025,64**	**1.028.763.593,00**	**97,53**
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	302.518.197,33	294.393.174,00	97,31
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	253.327.616,72	242.601.678,00	95,77
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	498.956.211,59	491.768.741,00	98,56
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**1.697.837.921,20**	**1.687.583.990,60**	**99,40**
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	407.837.921,20	401.281.270,60	98,39
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.290.000.000,00	1.286.302.720,00	99,71
TOTAL	**11.213.635.170,00**	**10.998.043.084,60**	**98,08**

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) Sakip	94,30 (AA)	94,57 (AA)	100,29%	7.643.535.990,99	7.470.687.600,00	97,74
		Nilai indeks kepuasan masyarakat	97,52	97,61	100,09%			
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%	100%	100%*)	100%*)	1.872.261.257,81	1.839.771.494	98,26%
3.	Meningkatnya diseminasi/publikasi kelitbangan/ inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan/inovasi yang dipublikasikan/didiseminasi	100%	100%	100%	1.697.837.921,20	1.687.583.990,60	99,40

*) data terakhir saat finalisasi laporan disusun

Tabel 3.12 Penghitungan Efisiensi

No.	Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Presentase Capaian	Rata-rata presentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi Anggaran	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) Sakip	94,30 % (AA)	94,57 % (AA)	100,29%	100,19%	7.643.535.990,99	7.470.687.600,00	97,74	1,03
		Nilai indeks kepuasan masyarakat	97,52	97,61	100,09%					
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%	100%	100*)	100%	100%	1.872.261.257,81	1.839.771.494	98,26%	1,02**)
3	Meningkatnya diseminasi/ publikasi kelitbangan/ inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan/inovasi yang dipublikasikan /didiseminasi	100%	100%	100%	100%	1.697.837.921,20	1.687.583.990,60	99,40	1,01

*) data terakhir saat finalisasi laporan disusun

**) efisiensi dihitung dengan realisasi kinerja diambil pada saat finalisasi laporan disusun

Berdasarkan perhitungan perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran sasaran tahun 2025 sebagaimana tabel 3.12 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek, dari 3 sasaran mencapai rata-rata sebesar 100,06%. Sedangkan capaian serapan anggaran Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek dari 3 sasaran mencapai rata-rata sebesar 98,08%. Dengan melihat kondisi tersebut maka penggunaan anggaran efisien karena perhitungan efisiensi dari ketiga sasaran adalah lebih besar dari 1.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2025 ini bahwa target tujuan dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek berjalan optimal dan efisien, hal ini bisa terlihat sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek tahun 2025 menurut rata-rata pencapaiannya dapat dikatakan berhasil, yakni sebesar 100,06%;
2. Capaian realisasi anggaran Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek tahun 2025 menurut rata-rata pencapaiannya dapat dikatakan berhasil, yakni sebesar 98,08%.

Untuk hasil capaian yang lebih baik di tahun-tahun mendatang, perlu adanya upaya-upaya perbaikan antara lain :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
3. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, diantaranya melalui kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis.

Upaya ke depan yang akan dilakukan dalam mendukung Pengarusutamaan Gender antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman seluruh bidang terkait dengan Pengarustamaan Gender
2. Menyediakan fasilitas yang ramah anak, perempuan dan disabilitas seperti ruang laktasi, ram jalan, toilet terpisah laki-laki dan perempuan
3. Kesetaraan dalam karir, seperti pengambilan keputusan dan promosi jabatan

4. Perlindungan dari kekerasan dan pelecehan baik verbal maupun fisik terhadap pegawai perempuan

Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2025 ini disusun berdasarkan data capaian realisasi kinerja dan anggaran sampai Desember 2025.

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JL. KH. Wahid Hasyim No. 5 Telp. (0355) 791121 Ngantru, Trenggalek, Jawa Timur
https://bappedalitbang.trenggalekkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes.**
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**
Jabatan : BUPATI TRENGGALEK

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 8 Januari 2025

BUPATI TRENGGALEK selaku Pihak Kedua,	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK selaku Pihak Pertama,
MOCHAMAD NUR ARIFIN	**dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes.** Pembina Utama Muda NIP. 196703311996032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) Sakip	94,30 % (AA)
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	97,52
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%	100%
3	Meningkatnya diseminasi/publikasi kelitbangan/inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan/inovasi yang dipublikasi/didiseminasi	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.606.654.549	APBD Kab. Trenggalek
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.303.280.700	APBD Kab. Trenggalek
3.	Prgram Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.211.989.500	APBD Kab. Trenggalek
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	515.422.070	APBD Kab. Trenggalek
	JUMLAH	**11.637.346.820**	

Trenggalek, 6 Januari 2025

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
selaku
Pihak Pertama,

dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 196703311996032003

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JL. KH. Wahid Hasyim No. 5 Telp. (0355) 791121 Ngantru, Trenggalek, Jawa Timur
https://bappedalitbang.trenggalekkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes.**
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**
Jabatan : BUPATI TRENGGALEK

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 26 September 2025

BUPATI TRENGGALEK selaku Pihak Kedua,	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK selaku Pihak Pertama,
MOCHAMAD NUR ARIFIN	**dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes.** Pembina Utama Muda NIP. 196703311996032003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) Sakip	94,30 % (AA)
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	97,52
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%	100%
3	Meningkatnya diseminasi/publikasi kelitbangan/inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan/inovasi yang dipublikasi/didiseminasi	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.643.535.990,99	PAPBD Kab. Trenggalek
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	817.459.232,17	PAPBD Kab. Trenggalek
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.054.802.025,64	PAPBD Kab. Trenggalek
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.697.837.921,20	PAPBD Kab. Trenggalek
	JUMLAH	**11.213.635.170,00**	

Trenggalek, 28 September 2025

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
selaku
Pihak Pertama,

dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 196703311996032003